

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Visi pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 sebagai arah pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun mendatang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 adalah : ***”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal”***

Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa kalimat sebagai berikut :

1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera.
2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Bermartabat.
3. Kearifan Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat.

Pengertian masing-masing unsur frasa visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera***, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.
2. ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Bermartabat***, yang dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya berahlak mulia, aparaturnya bersih dan berwibawa, serta diperhitungkan, dihargai dan dihormati dalam pergaulan di lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. ***Kearifan Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat***, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal

dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainnya, potensi sumberdaya alam serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.
4. Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
5. Mendorong iklim investasi yang berbasis potensi dan budaya daerah.
6. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Selanjutnya masing-masing misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik

Tujuan dari misi tersebut adalah :

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- a. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup system, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan public sesuai prinsip-prinsip *good governance*.
- b. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM);
- c. Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan keindahan di kalangan masyarakat;
- d. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah.

2. Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.

Tujuan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sasaran tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi.
 - b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
 - c. Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap sampai ke pelosok desa.
 - d. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat.
 - e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
 - f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi, dan utilitas lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa.
 - g. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk sanitasi lingkungan permukiman.
3. Misi 3: Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal

Tujuan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran tujuan tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.
- 2) Menurunnya angka gizi buruk.
- 3) Menurunnya angka kesakitan penduduk.
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda.

- 5) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.
- b. Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan.

Sasaran tujuan tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal.
 - 2) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan.
 - 3) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal.
 - 4) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik.
 - 5) Meningkatnya minat baca masyarakat.
- c. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Menurunnya jumlah penduduk miskin.
 - 2) Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS.
- d. Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
 - 2) Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.
- e. Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana.

Sasaran dari tujuan ini adalah :

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim.

4. Misi 4 : Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.

Tujuan dari misi tersebut adalah:

- a. Mengoptimalkan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, serta Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM.
- 2) Meningkatnya produktivitas Industri Kecil.
- 3) Meningkatnya aktivitas perdagangan.
- 4) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Pekalongan.

- b. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya produktivitas pertanian.
- 2) Meningkatnya produktivitas peternakan.
- 3) Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.
- 4) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kehutanan.

5. Misi 5 : Mendorong iklim investasi berbasis potensi dan budaya daerah.

Tujuan misi tersebut adalah:

Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi dan budaya daerah.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- a. Meningkatnya potensi produk unggulan daerah.

- b. Meningkatnya realisasasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal.

6. Misi 6: Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.

Tujuan misi tersebut adalah:

Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- a. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia.
- b. Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat.
- c. Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal.
- d. Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

7. Misi 7 : Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan misi tersebut adalah:

Membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- a. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.
- c. Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- d. Meningkatnya peran pihak swasta untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dibagi dalam 4 (empat) tahapan pembangunan yang meliputi *tahap pertama*, Konsolidasi dan Pemantapan Program (2011 -2012), *tahap kedua*, Pengembangan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat (2012-2014), *tahap ketiga* percepatan program prioritas (2014-2015) dan *tahap keempat* Pemantapan Pencapaian Kabupaten Pekalongan Sejahtera (2015 - 2016).

Penekanan fokus dimaksud bukan berarti menegasikan aspek lain, dan muara dari semua sasaran yang ingin dicapai atau *the ultimate goal*- nya adalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan, sehingga dalam setiap pentahapan dapat dimaknai upaya perwujudan *ultimate goal* dimaksud. Perincian setiap pentahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap Konsolidasi dan Pemantapan Program (2011 – 2012).

Pada tahap ini prioritas diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik dari sisi aparatur maupun kelembagaan, serta pemantapan kemampuan para pelaksana dalam implementasi program, termasuk program-program yang bersifat prioritas.

2. Tahap Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (2012 – 2014)

Pada tahap ini pembangunan diarahkan pada pengembangan infrastruktur melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yaitu jalan, jembatan, irigasi, air bersih, lingkungan hidup, listrik, perdagangan, industri, kearsipan, investasi, kesehatan, dan pendidikan. Melalui pengembangan infrastruktur diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, peningkatan investasi, produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, pariwisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan perlindungan tenaga kerja dan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan.

3. Tahap Percepatan Prioritas Program Kabupaten Pekalongan Sejahtera (2014 - 2015).

Pada tahap ini program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada upaya percepatan pencapaian program-program prioritas telah ditetapkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal. Program dan kegiatan

tersebut yaitu percepatan penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan *e-government*, penanganan PMKS, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas produksi UMKM dan industri kecil, peningkatan investasi, pengurangan kerusakan lingkungan, peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), penguatan forum masyarakat sebagai media komunikasi publik, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta destinasi pariwisata.

4. Tahap Pemantapan Pencapaian Kabupaten Pekalongan Sejahtera (2015 - 2016).

Pada tahap ini program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada upaya pemantapan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal. Program dan kegiatan tersebut adalah pemantapan penanggulangan kemiskinan, pemantapan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, peningkatan kualitas produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta pengendalian lingkungan hidup.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013

Sasaran utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan;
4. Peningkatan pembangunan demokrasi dan
5. Pembangunan penegakan hukum.

Selanjutnya dengan memperhatikan sasaran utama ditetapkan 11 (sebelas) prioritas kebijakan pembangunan nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya. Adapun 11 prioritas dimaksud adalah :

1. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan ;

2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan ;
3. Perbaikan akses dan mutu Kesehatan ;
4. Penanggulangan Kemiskinan ;
5. Peningkatan Ketahanan Pangan ;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur ;
7. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha ;
8. Peningkatan sumber daya energi ;
9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana ;
10. Penanganan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca – konflik ;
11. Pengembangan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Sedangkan 3 (tiga) prioritas lainnya adalah 1). Bidang politik hukum dan keamanan ; 2). Bidang perekonomian ; dan 3) Bidang kesejahteraan rakyat.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 seperti termuat dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kemiskinan;
2. Memantapkan ketahanan pangan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang didukung peningkatan infrastruktur;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana;
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Memantapkan demokratisasi dan kondusifitas wilayah.

Selanjutnya dalam menentukan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Pekalongan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak langsung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (IPM) Kabupaten Pekalongan,
2. Memiliki daya ungkit dan dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan,
4. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama,
5. Realistis untuk dilaksanakan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan target sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional yang dititikberatkan pada peningkatan daya tahan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, maka sesuai pentahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016, pembangunan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 memasuki Tahapan Kedua, yaitu pengembangan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka **prioritas** penyusunan perencanaan program diarahkan untuk :

1. Pengembangan infrastruktur melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yaitu jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik, perdagangan, industri, kearsipan, investasi, kesehatan dan pendidikan.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, peningkatan investasi, produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta pariwisata.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 harus memperhatikan prinsip-prinsip pengarusutamaan sebagai landasan operasional bagi aparat pelaksana di daerah, yaitu :

1. Pengarusutamaan partisipasi masyarakat.

Untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap kota dan hasil-hasil pembangunan, maka dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan

harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, baik dalam sisi tahapan, proses maupun pengawasan.

2. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan harus juga mengakomodasi kepentingan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, merujuk pada ketentuan tata ruang, minimasi dampak, memperhatikan daya dukung lingkungan danantisipasi perubahan iklim dan mitigasi bencana alam, agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.
3. Pengarusutamaan keseimbangan dan pengurangan disparitas antara kawasan kota bagian selatan dan utara. Secara bertahap kawasan utara dapat dikembangkan secara proporsional sesuai potensi dan kapasitas lingkungannya sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan peran kota. Begitu juga dengan pengembangan kawasan perbatasan dan pinggiran akan dilakukan secara intensif.
4. Pengarusutamaan gender. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai potensi, kemampuan intelektual, dan kapasitas yang setara, untuk itu minimasi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan harus selalu dilakukan, agar kesetaraan gender akan melahirkan sinergitas produktif.
5. Pengarusutamaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tiga pilar utama *good governance* adalah pemerintah, sektor privat dan masyarakat madani. Sehingga sudah semestinya keseimbangan diantara ketiga pilar tersebut dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang dijalankan akan mampu melahirkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan produktif, serta meminimalkan peluang korupsi.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 dijabarkan dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan bidang kewenangan urusan pemerintahan daerah (wajib dan pilihan) dan diselaraskan dengan fungsi-fungsi pemerintahan pada pemerintah pusat. Fungsi-fungsi tersebut meliputi : (1) Pelayanan Umum, (2) Ketertiban dan Ketentraman, (3) Ekonomi, (4) Lingkungan Hidup, (5) Perumahan dan Fasilitas Umum, (6)

Kesehatan, (7) Pariwisata dan Budaya, (8) Pendidikan, dan (9) Perlindungan Sosial.

Keselarasn fungsi pemerintahan dan urusan pemerintahan daerah tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sinkronisasi / Keselarasan Fungsi Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Daerah

NO.	FUNGSI PEMERINTAHAN	JENIS URUSAN	KATEGORI
1	Pelayanan umum	1) Perencanaan pembangunan; Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; 3) Kearsipan, 4) Komunikasi dan Informatika.	Wajib Wajib Wajib Wajib
2	Ketertiban dan ketentraman	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Wajib
3	Ekonomi	1) Perhubungan; 2) Ketenagakerjaan; 3) Koperasi dan UKM; 4) Penanaman Modal; 5) Ketahanan Pangan; 6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7) Pertanian; 8) Energi dan Sumber Daya Mineral; 9) Peternakan, Kelautan dan Perikanan; 10) Perdagangan; 11) Industri; 12) Ketransmigrasian; 13) Kehutanan	Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Pilihan Pilihan Pilihan Pilihan Pilihan Pilihan Pilihan
4	Lingkungan Hidup	1) Penataan Ruang; 2) Lingkungan Hidup	Wajib Wajib
5	Perumahan dan fasilitas umum	1) Pekerjaan Umum; 2) Perumahan	Wajib Wajib
6	Kesehatan	1) Kesehatan; 2) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Wajib Wajib
7	Pariwisata dan budaya	1) Kebudayaan; 2) Pariwisata	Wajib Pilihan
8	Pendidikan	1) Pendidikan; 2) Kepemudaan dan Olah Raga; 3) Perpustakaan	Wajib Wajib Wajib
9	Perlindungan sosial	1) Kependudukan dan Catatan Sipil; 2) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 3) Sosial.	Wajib Wajib Wajib

Tabel 4.2
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2013
dengan Isu Strategis dan Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016

PRIORITAS NASIONAL (RKP 2013)	PRIORITAS PROV. JATENG 2013	PRIORITAS KAB. PKL 2013	ISU STRATEGIS 2013	MISI RPJMD
1. Reformasi Birokrasi & Tata Kelola	Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Pelayanan Publik	Perlunya pemantapan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	MISI 1 dan 7
2. Pendidikan	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Masih perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dasar (kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman, air bersih dan sanitasi)	MISI 3
3. Kesehatan		Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
14. Kesejahteraan Rakyat		Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran	
4. Penanggulangan Kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan			

PRIORITAS NASIONAL (RKP 2013)	PRIORITAS PROV. JATENG 2013	PRIORITAS KAB. PKL 2013	ISU STRATEGIS 2013	MISI RPJMD
5. Ketahanan Pangan	Memantapkan ketahanan pangan	Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan		MISI 4
6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi & Dunia Usaha 8. Energi 11. Kebudayaan, Kreativitas & Inovasi 13. Perekonomian	Meningkatkan potensi & daya saing daerah didukung peningkatan infrastruktur	Pengembangan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Irigasi, Air Bersih, Listrik, Perdagangan, Industri, Investasi, Pariwisata dan UMKM)	Masih perlunya peningkatan infrastruktur Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi	MISI 2, 4 dan 5
9. Lingkungan Hidup & Bencana	Meningkatkan kualitas pengelolaan & pengendalian LH& pengurangan resiko bencana		Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana alam	
12. Politik, Hukum dan Keamanan	Memantapkan demokratisasi dan kondusivitas wilayah	Peningkatan Pelayanan publik		MISI 6 dan 7

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2013 selengkapnya dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013
Sesuai Dengan Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya prestasi PNS • Terkendalinya pelaksanaan kegiatan prioritas • Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat • Meningkatnya PAD Kab Pekalongan • Tertatanya administrasi kependudukan • Tersusunnya Sistem Informasi thd layanan publik • Tersampainya program daerah kepada masyarakat • Terlaksananya kerja sama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan dan pengembangan aparatur • Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH • Program pengintensifikasian penanganan pengaduan masyarakat • Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah • Program peningkatan administrasi kependudukan • Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi • Program kerjasama informasi dengan media massa • Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Setda • BKD • Inspektorat • Dishubkominfo • DPPKD • Dindukcapil • Bappeda
2.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah Yang Berwawasan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunannya TPA sampah yang higienis • Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang • Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan hutan • Meningkatnya kapasitas aparat desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan • Program pengendalian pemanfaatan ruang • Program rehabilitasi hutan dan lahan • Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa • Program penataan 	<ul style="list-style-type: none"> • DPSDAESDM • DPPK • Setda • Dishubkominfo • DPU • Dinperindagkop UMKM • Kaperpus Arsipda • Dindikbud • Dinporapar • Dinkes

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		<p>dalam pemanfaatan ADD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya perbub tentang pelimpahan wewenang sebagian urusan Kab ke Desa • Tertatanya tempat-tempat pemberhentian angkutan umum • Meningkatnya kondisi jembatan yang baik • Meningkatnya kondisi Jalan yang baik • Meningkatnya rumah tangga yang mengakses air bersih • Meningkatnya jaringan irigasi dengan kondisi baik • Tertatanya PKL • Meningkatnya sarana dan prasarana pondok pesantren • Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga • Bertambahnya jumlah puskesmas rawat inap • Meningkatnya kualitas jalan poros desa • Berkurangnya pemukiman kumuh 	<p>peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan pelayanan angkutan • Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan • Program pengembangan ketenagalistrikan dan migas • Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah • Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya • Program penataan pedagang kaki lima • Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan • Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga • Program pembangunan Puskesmas dan jaringannya • Program pembangunan infrastruktur pedesaan • Program perumahan • Program pengendalian perusakan dan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 	
3.	Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD • Berkurangnya ruang kelas yang rusak • Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran • Tersusunnya Rintisan perguruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program PAUD • Program Pendidikan Dasar • Program pendidikan menengah • Program pendidikan non formal • Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dindikbud • Dinsosnakertrans • Disporapar • Dinkes • Bappeda • BPMPKB • Kesbangpol • BPBD

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesejahteraan pelaku pendidikan non formal dan informal • Meningkatnya kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan • Meningkatnya ketrampilan pencari kerja • Berkurangnya jumlah pengangguran • Meningkatnya minat baca masyarakat • Berkurangnya angka putus sekolah SMA/MA/SMK • Meningkatnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin • Meningkatnya kerjasama pelayanan kesehatan • Meningkatnya cakupan penanganan persalinan oleh tenaga kesehatan • Berkurangnya kejadian penyakit menular dan tidak menular • Semakin menguatnya kelembagaan penanggulangan kemiskinan • Tersedianya data PMKS dan PSKS • Meningkatnya kualitas kelembagaan perlindungan sosial • Berkurangnya anak terlantar • Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan bencana alam • Meningkatnya kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan • Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja • Program peningkatan kesempatan kerja • Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan • Program pengembangan kemitraan • Program peningkatan kesehatan ibu dan anak • Program pemberantasan penyakit menular dan tidak menular • Program penanggulangan kemiskinan • Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya • Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam • Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan • Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa • Program keluarga berencana • Program Pengelolaan Kekayaan Budaya • Program Pengembangan nilai dan seni budaya • Program pembinaan dan pasyarakatan olahraga 	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya cakupan keluarga berencana aktif • Meningkatnya kearifan lokal penopang pembangunan • Menguatnya kelompok-kelompok kesenian • Meningkatnya prestasi olah raga 		
4.	Fasilitasi Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, Pertanian, Perikanan dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas petani dan pelaku agribisnis • Meningkatnya kualitas dan teknis pemasaran atas hasil produksi • Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan • Meningkatnya pemanfaatan teknologi pertanian/perkebunan • Meningkatnya jaringan pemasaran • Terfasilitasinya kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah • Meningkatnya jaringan jaringan kluster industri • Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata • Meningkatnya kapasitas UMKM • Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pembenihan ikan • Berkembangnya perikanan budidaya • Meningkatnya promosi hasil UMKM • Meningkatnya kluster agribisnis dan agroindustri 	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan kesejahteraan petani • Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan • Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan • Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan • Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah • Program pengembangan industri kecil dan menengah • Program pengembangan destinasi pariwisata • Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif • Program pengembangan budidaya perikanan • Program peningkatan produksi hasil peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • DPPK • Dinperindag UMKM • Disporapar • Bappeda • DPU • BPMPKB • Dinkes

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kelembagaan organisasi desa dalam pemberdayaan masyarakat Meningkatnya produksi peternakan 		
5.	Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi dan budaya daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya RUPMD Meningkatnya produk unggulan daerah Terlaksananya promosi investasi Tersusunnya prosedur perijinan penanaman modal yang lebih sederhana Meningkatnya investor Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Program perencanaan pembangunan daerah Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Diperindagkop UMKM BPMPPT Setda Kesbangpol Satpol PP
6.	Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas ormas dan orsospol Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Menguatnya lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender 	<ul style="list-style-type: none"> Program pembinaan organisasi masyarakat sipil Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Satpol PP BPMPKB
7.	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi, kegiatan politik, sosial maupun budaya	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Terbangunnya hot spot area di ruang publik Meningkatnya forum-forum diskusi masyarakat sosial Meningkatnya forum 	<ul style="list-style-type: none"> Program perencanaan pembangunan daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi Dan Informatika Program 	<ul style="list-style-type: none"> Dihubkominfo BPMPKB Dinporapar Kesbangpol

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		musyawarah tingkat kecamatan <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya temu wicara organisasi pemuda • Meningkatnya pemahaman politik kepada masyarakat 	mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan peran serta kepemudaan • Program pendidikan politik masyarakat 	

C. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi umum yang ditempuh dalam rangka meningkatkan akselerasi dan pengembangan program/ kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 adalah :

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik.

1. Menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi kinerja SKPD, dan perwujudan *e-government*.
2. Menciptakan kelembagaan pemerintahan yang responsif dan mampu menyelenggarakan Tupoksi secara maksimal melalui penetapan perangkat kebijakan tentang pelaksanaan *good governace*, dan penataan SOTK yang ramping namun kaya fungsi.
3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan lanjut, diklat dan bintek serta pembinaan moral dan mental aparatur.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, optimalisasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kesadaran masyarakat akan haknya dalam memperoleh pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah serta pengembangan sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan.

6. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan prinsip-prinsip pengawasan dan pengendalian yang efektif, peningkatan kualifikasi dan jumlah aparatur pengawas serta peningkatan cakupan pemeriksaan.
7. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi serta peningkatan kinerja BUMD.
8. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik kewenangan wajib maupun pilihan melalui pengembangan potensi daerah, penyelenggaraan kerjasama antar daerah, antar pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat.
9. Optimalisasi pengelolaan arsip melalui peningkatan kualitas pendataan, pemeliharaan dan akuisisi arsip.

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kepada Pemerataan Wilayah dan Berwawasan Lingkungan.

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan melalui pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan dan peningkatan kuantitas sarana keselamatan lalu lintas serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya.
3. Meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui intensitas pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan baru, pembangunan jembatan, peningkatan partisipasi masyarakat untuk turut serta memelihara jalan dan jembatan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi melalui perbaikan jaringan irigasi rusak dan pemeliharaan secara intensif serta pembangunan saluran irigasi baru serta optimalisasi peran dan partisipasi P3A (Paguyuban Petani Pemakai Air).
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan perindustrian yang berkualitas melalui pengintegrasian penataan kawasan industri dan perdagangan, penataan pedagang kakilima,

- peningkatan kualitas pasar tradisional, optimalisasi pasar agro dan pengaturan serta pengendalian pasar *retail* modern.
6. Meningkatkan jumlah rumahtangga berlistrik melalui Pengembangan jaringan PLN ke desa yang terjangkau PLN dan pengembangan sumber energi listrik terbarukan (mikro hidro) bagi desa yang tidak atau belum terjangkau PLN.
 7. Meningkatkan pemerataan penyediaan air bersih ke pelosok desa melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pemeliharaan sumber-sumber air bersih berbasis potensi/kearifan lokal, peningkatan swadaya masyarakat dalam penyediaan air bersih.
 8. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan kualitas sanitasi melalui pemanfaatan lahan pekarangan, peningkatan jumlah ruang terbuka hijau, peningkatan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman.
 9. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan melalui pembuatan tempat pembuangan sampah *sanitary landfill*, dan pengelolaan sampah dengan metode 3R.
 10. Meminimalisir penggunaan lahan tidak sesuai dengan tataruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan lahan, peningkatan komitmen dan pengawasan pemerintah serta penegakan hukum dalam pelaksanaan perda tataruang.
 11. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan melalui optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD), peningkatan kompetensi aparatur desa, peningkatan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan dan penyusunan Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan dari bupati kepada pemerintah desa.
 12. Meningkatkan penanganan kerusakan hutan melalui peningkatan peran LMDH, dan penegakan hukum.
 13. Mengurangi lahan kritis melalui peningkatan kesadaran dan konservasi lahan serta dalam pemanfaatan lahan secara bijaksana.
 14. Meningkatkan keasrian dan keindahan ruang terbuka hijau dengan pengelolaan pertamanan.

15. Meningkatkan jumlah dan pengelolaan penerangan jalan umum dan meterasasi.

Misi 3 : Memantapkan Kondisi Sosial Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan, pemberdayaan dan kemitraan seluruh elemen masyarakat serta peningkatan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan.
2. Mendorong terwujudnya kondisi lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat dalam mencegah penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa.
3. Merumuskan kebijakan dan memantapkan manajemen untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan melalui perencanaan yang komprehensif.
4. Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui regulasi kesehatan dan pengembangan profesionalisme.
5. Meningkatkan peran kader posyandu untuk meningkatkan peserta KB aktif melalui media komunikasi dan informasi
6. Meningkatkan pemerataan sarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah, melalui perbaikan ruang kelas yang rusak, pembangunan ruang kelas baru, kerjasama dengan pihak swasta dan komite sekolah serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi sekitar untuk perintisan adanya perguruan tinggi di Kajen.
7. Meningkatkan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang biayanya terjangkau, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
8. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pemberian beasiswa dan kesempatan untuk studi lanjut dan mengikuti pendidikan dan latihan.
9. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan, serta bursa kerja kerja *on line*.
10. Meningkatkan minat baca melalui pembangunan dan

pengembangan perpustakaan masyarakat, pengadaan kegiatan yang mendorong minat baca masyarakat, peningkatan koleksi buku perpustakaan.

11. Mengoptimalkan pengelolaan usaha mikro dan kecil melalui peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat.
12. Mengoptimalkan PSKS (Potensi, Sumberdaya Kesejahteraan Sosial) melalui penyediaan sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
13. Mengoptimalkan lembaga dan organisasi kesenian dalam meningkatkan potensi kesenian lokal, pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat
14. Pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat dimasing-masing kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku.
15. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana pada masyarakat melalui pendidikan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana.
16. Meningkatkan kelestarian arsip daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana kearsipan serta peningkatan kapasitas arsiparis.
17. Mengoptimalkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui peningkatan fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, fasilitasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten.
18. Meningkatkan kualitas transmigrasi melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon transmigrans, peningkatan kinerja aparat penyelenggara transmigrasi dan koordinasi antar daerah asal dan tujuan transmigrasi.

Misi 4 : Fasilitasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM, Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

1. Meningkatkan kapasitas Koperasi dan UMKM melalui fasilitasi pelatihan, akses permodalan dan penguatan kelembagaan.
2. Meningkatkan kapasitas industri kecil dan menengah melalui fasilitasi akses permodalan, temu usaha dan penguatan pemasaran.
3. Meningkatkan kontribusi perdagangan terhadap PDRB melalui perbaikan sarana dan prasarana perdagangan, penyusunan kebijakan distribusi barang dan jasa, pengembangan jaringan kerjasama perdagangan baik intern maupun ekstern.
4. Meningkatkan destinasi wisata melalui optimalisasi pengelolaan obyek wisata, meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata.
5. Meningkatkan produktivitas, mutu hasil pertanian, sumberdaya pertanian melalui optimalisasi distribusi saprodi pertanian dan peternakan, pengembangan usaha pertanian kawasan terpadu, dan manajemen usaha serta pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.
6. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat pesisir.
7. Meningkatkan Produktivitas Perkebunan dan kehutanan melalui optimalisasi perkebunan rakyat dan hutan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan dan kehutanan.

Misi 5 : Mendorong Iklim Investasi Berbasis Potensi dan Budaya Daerah.

1. Meningkatkan iklim usaha dan pelayanan penanaman modal melalui optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu, pemberian insentif dan penyederhanaan perijinan penanaman modal.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi melalui optimalisasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan promosi penanaman modal.
3. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui penguatan kelembagaan keamanan lingkungan.

Misi 6 : Mewujudkan Rasa Aman dan Adil Pada Masyarakat.

1. Meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan HAM melalui peningkatan kapabilitas aparat penegak hukum, pengawasan intensif oleh masyarakat dalam penegakan hukum, peningkatan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Meningkatkan keamanan dan perlindungan masyarakat melalui penguatan pada kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) di tingkat desa/kelurahan dengan Kepolisian.
3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak melalui penguatan kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender), perlindungan anak, serta pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Misi 7 : Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi, Kegiatan Politik, Sosial Maupun Budaya.

1. Meningkatkan kinerja aktivitas kelembagaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.
2. Meningkatkan forum-forum publik sebagai media komunikasi penyelenggaraan pembangunan daerah melalui peningkatan keterbukaan di kalangan masyarakat, partisipasi masyarakat dan sebagai bentuk kearifan lokal.
3. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan berpolitik di masyarakat melalui pengembangan kader-kader sosial masyarakat, dan optimalisasi partai politik.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui optimalisasi pengelolaan sampah dengan memanfaatkan potensi swadaya dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui metode 3R (*reduce, reuse dan recycle*), serta memanfaatkan peluang kerja sama antar daerah.